



Invisible Prosperity: Mengungkap Makna Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Kecil di Sekitar Lapangan Puputan Niti Mandala Denpasar

Ni Luh Putu Dewi Ardhiyanti
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Indonesia
email: dewiardhiyanti@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 Juni 2026

Direvisi pada
6 Juli 2026

Disetujui pada
27 Juli 2026

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan membedah kemakmuran serta mengidentifikasi biaya penyamaran sosial (*glittering poverty*) oleh masyarakat lokal di tengah pesatnya komodifikasi budaya.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi fenomenologi mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif terhadap kegiatan adat-ekonomi, dan analisis dokumen sosial.

Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara kesejahteraan berbasis simbol-tradisi yang mahal dengan kerentanan finansial rumah tangga. Komodifikasi budaya memaksa kompromi pada nilai sakral sekaligus membebankan beban finansial demi mempertahankan status sosial dan identitas tradisi di tengah kapitalisme.

Implikasi: Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan daerah untuk mengembangkan arah pembangunan budaya agar tidak hanya mengejar pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB), tetapi juga mempertimbangkan jaringan pengaman sosial dan kesejahteraan riil masyarakat lokal.

Kata kunci: pariwisata budaya, ilusi kemakmuran, deskripsi kemiskinan, komodifikasi, kecukupan

Abstract

Purpose: This study aims to unravel and dissect the illusion of affluence (*glittering poverty*) and identify the social masking costs borne by local communities amidst the rapid commodification of cultural tourism.

Research methods: This study employs a descriptive qualitative approach with in-depth phenomenology. Data were gathered through in-depth interviews, participatory observation in cultural-economic practices, and social document analysis.

Results and discussion: Findings reveal a stark contradiction between the appearance of affluence represented by costly traditional symbols and the actual financial vulnerability of local households. Cultural commodification forces a compromise on sacred values while generating systematic burdens to maintain social status and traditional identity against capitalist pressures.

Implication: This study provides a basis for regional policy recommendations to develop cultural development directions that do not solely pursue Gross Regional Domestic Product (PDRB) growth but also consider social safety nets and the real well-being of local communities.

Keywords: cultural tourism, illusion of prosperity, glittering poverty, commodification, sufficiency

PENDAHULUAN

Dalam teori pembangunan ekonomi kontemporer, terdapat kesenjangan yang mencolok antara indikator makroekonomi konvensional dan realitas empiris kehidupan



sektor informal. Ukuran statistik standar seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau garis kemiskinan formal yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali gagal menangkap nuansa *lived experiences* dari jutaan pelaku usaha mikro di perkotaan negara berkembang. Keterbatasan metrik moneter ini mengabaikan dimensi non-material dari kesejahteraan, sebuah kritik yang telah lama disuarakan oleh Amartya Sen melalui *Capability Approach*-nya, yang menegaskan bahwa pembangunan harus dinilai dari perluasan kebebasan substantif individu untuk mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang mereka hargai, bukan sekadar akumulasi komoditas (Sen, 1999). Perspektif ini diperkuat oleh temuan Kahneman & Deaton (2010) yang menunjukkan bahwa meskipun pendapatan tinggi meningkatkan evaluasi kognitif terhadap kehidupan (*evaluative well-being*), ia tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan emosional harian (*emotional well-being*). Fenomena ini, yang selaras dengan paradoks Easterlin (Easterlin, 1974; 2017), menyarankan bahwa setelah titik jenuh tertentu, faktor-faktor sosial dan psikologis menjadi penentu utama kebahagiaan, bukan tambahan pendapatan marginal.

Konteks Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala di Denpasar, Bali, menawarkan laboratorium alamiah yang unik untuk menguji dinamika tersebut. Sebagai ruang publik (*public sphere*) urban yang multifungsi, lapangan ini bukan hanya arena rekreasi, tetapi juga simpul interaksi budaya, keagamaan, dan ekonomi informal. Di sini, pedagang kaki lima, penjual musiman, dan penjaja kuliner beroperasi dalam ekosistem yang kompleks. Secara kalkulasi akuntansi konvensional, banyak dari pedagang ini berada di ambang kerentanan ekonomi. Namun, observasi lapangan mengungkapkan sebuah Paradoks Kesejahteraan, meski menghadapi fluktuasi pendapatan harian dan tekanan regulasi tata ruang, mereka menunjukkan tingkat resiliensi dan kepuasan hidup yang stabil. Hal ini menantang narasi dominan dalam literatur ekonomi pembangunan yang cenderung memandang sektor informal semata-mata sebagai situs kemiskinan dan eksploitasi (Chen, 2012; Roy, 2005).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pedagang di Niti Mandala mengelola ketidakpastian melalui strategi penghidupan (*livelihood strategies*) yang cangguh dan berbasis komunitas. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada modal finansial, melainkan pada modal sosial yang tebal. Jaringan informal, termasuk sistem gotong royong lokal atau 'masehi', berfungsi sebagai informal *safety net* yang menyerap guncangan ekonomi ketika pendapatan anjlok atau ketika terjadi penertiban oleh aparat. Konsep modal sosial ini, sebagaimana diuraikan oleh Portes (1998) dan Woolcock & Narayan (2000), bertindak sebagai mekanisme perlindungan yang tidak terlihat dalam neraca keuangan namun vital bagi keberlanjutan usaha. Putnam (2000) membedakan

antara *bonding* dan *bridging social capital*; dalam konteks Niti Mandala, ikatan bonding antar-pedagang menciptakan solidaritas ketat, sementara interaksi dengan pengunjung lapangan membentuk *bridging capital* yang memperluas akses pasar. Laporan Kebahagiaan Dunia terbaru juga menegaskan bahwa dukungan sosial dan kepercayaan merupakan prediktor kuat kesejahteraan nasional, sering kali melampaui pengaruh PDB (Helliwell *et al.*, 2023; Diener *et al.*, 2018).

Pendekatan *Sustainable Livelihoods Framework* (Scoones, 1998; 2015) memberikan lensa teoritis untuk memahami bagaimana aset-aset non-finansial ini dikonversi menjadi hasil penghidupan yang positif. Chambers (1995) mengingatkan kita untuk bertanya, "*Whose reality counts?*" Dalam kasus ini, realitas pedagang yang mendefinisikan keberhasilan bukan hanya melalui profit maksimalisasi tetapi melalui keseimbangan waktu, otonomi, dan harmoni sosial sering kali diabaikan oleh pembuat kebijakan. Banerjee & Duflo (2011) dalam *Poor Economics* berargumen bahwa kaum miskin bukanlah irasional, melainkan mengambil keputusan dalam lingkungan dengan batasan institusional dan informasi yang ketat. Demikian pula, Deaton (2013) menekankan bahwa ketimpangan dan kesejahteraan harus dipahami melalui cerita individu tentang kesehatan, kekayaan, dan peluang. Bank Dunia (2019) baru-baru ini juga mulai mengakui perlunya memikirkan kembali kekayaan informal dan ketahanan urban di negara berkembang, menggeser fokus dari pemberantasan informalitas menuju pengakuan atas kontribusinya terhadap ketahanan kota.

Meskipun literatur mengenai ekonomi informal di Asia Tenggara cukup melimpah, sebagian besar studi masih terjebak dalam dikotomi kerentanan versus ketahanan material, atau berfokus pada dampak negatif ketiadaan perlindungan hukum. Sangat sedikit penelitian yang mengeksplorasi mekanisme internal pembentukan apa yang kami sebut sebagai *Invisible Prosperity* (Kemakmuran Tak Kasatmata) sebuah bentuk kesejahteraan yang dibangun di atas fondasi modal sosial, fleksibilitas temporal, dan makna budaya, khususnya dalam ruang publik urban yang sarat nilai tradisi seperti Bali. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menuntut investigasi lebih mendalam untuk memahami bagaimana pedagang kecil memaknai dan mengalami kesejahteraan di tengah keterbatasan struktural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian utama: (1) Bagaimana pedagang kecil di sekitar Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala mendefinisikan dan mengalami kesejahteraan ekonomi di luar indikator pendapatan moneter? (2) Peran apa yang dimainkan oleh modal sosial dan jaringan informal dalam menciptakan resiliensi finansial dan *Invisible Prosperity*? (3) Bagaimana interaksi antara karakteristik ruang publik urban Bali dan

strategi penghidupan pedagang membentuk persepsi mereka tentang kecukupan dan kebahagiaan?

Kontribusi artikel ini bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana *Subjective Well-Being (SWB)* dan ekonomi informal dengan memperkenalkan konstruk *Invisible Prosperity* yang mengintegrasikan pendekatan kapabilitas Sen dengan dinamika modal sosial lokal. Secara praktis, temuan ini menawarkan implikasi kebijakan bagi pemerintah kota Denpasar dan pemangku kepentingan lainnya. Alih-alih pendekatan represif atau bantuan sosial yang bersifat karitatif, kebijakan tata ruang dan pemberdayaan ekonomi seharusnya dirancang untuk memperkuat aset-aset non-finansial yang sudah ada, seperti memfasilitasi ruang interaksi sosial, mengakui legitimasi operasional sektor informal, dan membangun sistem pendukung yang selaras dengan mekanisme self-help komunitas. Dengan demikian, kita dapat merancang kota yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga inklusif secara manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perspektif Fenomenologi Ekonomi dan Etnografi Terapan (*Applied Ethnography*) untuk menggali secara mendalam makna kemakmuran tak kasatmata (*invisible prosperity*) di kalangan pedagang kecil. Pemilihan desain ini didasari oleh kritik epistemologis terhadap dominasi metrik kuantitatif dalam mengukur kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana ditegaskan oleh Sen (1999) dalam *Capability Approach*, kesejahteraan tidak dapat direduksi sekadar pada akumulasi komoditas atau pendapatan nominal, melainkan pada perluasan kebebasan substantif individu untuk mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang bernilai. Data statistik agregat sering kali gagal menangkap nuansa lived experiences dan kerentanan multidimensi yang dihadapi pekerja informal. Selain itu, mengacu pada distincsi Daniel Kahneman mengenai *hedonic versus evaluative well-being* (Kahneman *et al.*, 1999), penelitian ini berupaya memahami bukan hanya evaluasi kognitif pedagang terhadap kondisi ekonomi mereka, tetapi juga pengalaman afektif harian mereka rasa cemas saat sepi pembeli, kebahagiaan saat berinteraksi dengan pelanggan tetap, atau rasa aman karena dukungan komunitas. Oleh karena itu, interpretasi mendalam terhadap narasi subjektif menjadi prasyarat metodologis untuk mengungkap realitas yang tersembunyi di balik angka-angka kemiskinan formal (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kawasan Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, yang berfungsi sebagai *public sphere* utama dan pusat gravitasi ekonomi informal perkotaan di Bali. Pemilihan situs ini didasarkan pada

karakteristiknya sebagai ruang hibrida tempat aktivitas ekonomi, rekreasi, dan ritual budaya beririsan secara intensif, menciptakan dinamika pasar unik yang tidak ditemukan di lokasi komersial konvensional. Unit analisis penelitian ini adalah strategi penghidupan (*livelihood strategies*) dan konstruksi makna kesejahteraan dari para pelaku usaha mikro. Teknik pemilihan informan menggunakan kombinasi *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* untuk memastikan keberagaman profil responden. Kriteria inklusi informan mencakup: (1) lama berdagang minimal satu tahun untuk memastikan pemahaman mendalam tentang siklus pasar; (2) variasi jenis usaha, meliputi pedagang menetap (kuliner, pakaian), pedagang musiman (mainan, aksesoris), dan penyedia jasa; serta (3) variasi tingkat kerentanan ekonomi dan status kepemilikan lapak. Proses snowball difasilitasi oleh tokoh kunci dalam paguyuban pedagang, yang memungkinkan akses kepada informan yang mungkin tertutup bagi peneliti luar, sesuai dengan prinsip keterlekatan sosial dalam aksi ekonomi (Portes & Sensenbrenner, 1993). Total informan kunci berjumlah 15 orang, ditambah dengan wawancara terbatas terhadap pengelola kawasan dan aparat Satpol PP untuk triangulasi perspektif regulasi.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui tiga instrumen utama: wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipatif, dan catatan lapangan (*field notes*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menceritakan pengalaman mereka secara alami tanpa dibatasi oleh kategori pertanyaan yang kaku. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti ritme kerja harian pedagang, mulai dari proses persiapan dagangan di sore hari, puncak kesibukan di malam hari, hingga pembongkaran lapak. Teknik ini, yang diadaptasi dari metode etnografi Spradley (1980/2016), memungkinkan peneliti menyaksikan langsung interaksi non-verbal, negosiasi harga, dan respons spontan terhadap situasi darurat (seperti hujan tiba-tiba atau inspeksi mendadak). Data sekunder meliputi Peraturan Daerah terkait Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), dokumen rencana tata ruang kota Denpasar, serta laporan tahunan dinas terkait, yang digunakan untuk memetakan konteks struktural yang membatasi atau memfasilitasi aktivitas ekonomi informal (Roy, 2005; World Bank, 2019).

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik *fieldwork immersion* atau perendaman diri di lapangan selama periode empat bulan. Peneliti hadir secara konsisten di lokasi untuk membangun kepercayaan (*rapport*) dengan komunitas pedagang, sebuah langkah krusial mengingat sensitivitas isu legalitas dan pendapatan. Instrumen utama berupa panduan wawancara semi-terstruktur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Indikator Ekonomi Konvensional: Menemukan 'Invisible Prosperity' di Lapangan

Analisis data kualitatif dari pedagang di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon mengungkap sebuah diskrepansi yang mencolok antara indikator kemiskinan moneter konvensional dengan realitas kesejahteraan subjektif yang dialami para pelaku usaha. Jika ditelisik melalui lensa statistik formal seperti garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) atau standar pendapatan minimum sebagian besar pedagang ini tergolong dalam kategori vulnerable atau bahkan miskin, dengan pendapatan harian bersih yang fluktuatif antara Rp50.000 hingga Rp250.000. Namun, narasi empiris di lapangan menunjukkan bahwa angka-angka tersebut gagal menangkap esensi kecukupan (*sufficiency*) yang menjadi tolok ukur utama kebahagiaan mereka. Sebagaimana dikritisi oleh Stiglitz *et al.* (2009), ketergantungan pada agregat makroekonomi seperti PDB sering kali buta terhadap distribusi kesejahteraan riil dan kualitas hidup individu. Dalam konteks Niti Mandala, kesejahteraan tidak didefinisikan oleh akumulasi aset modal tetap, melainkan oleh likuiditas arus kas harian (*daily cash flow liquidity*) yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan subsistensi segera tanpa jeratan utang berbunga tinggi.

Wawancara mendalam dengan Pak Wayan, seorang penjual lumpia yang telah beroperasi selama delapan tahun, memberikan ilustrasi nyata tentang fenomena ini. "Uang masuk setiap hari, walaupun sedikit-sedikit, tapi itu uang bersih. Tidak ada bos yang menagih target, tidak ada cicilan bank yang mencekik leher," ujarnya sambil menyiapkan dagangan di sore hari. Pernyataan ini merefleksikan logika rasionalitas ekonomi kaum marjinal yang dijelaskan oleh Banerjee & Duflo (2011) dalam *Poor Economics*, di mana manajemen risiko dan likuiditas harian lebih dihargai daripada potensi profit jangka panjang yang penuh ketidakpastian. Bagi para pedagang, kebebasan dari utang terstruktur merupakan bentuk kekayaan yang tak terlihat (*invisible wealth*). Mereka mampu membiayai kebutuhan pokok, pendidikan anak, serta yang paling krusial dalam konteks Bali: kewajiban ritual keagamaan dan sosial (yadnya dan ngaben). Kemampuan untuk berpartisipasi dalam ritual adat tanpa rasa malu sosial menjadi indikator *evaluative well-being* yang jauh lebih signifikan daripada sekadar surplus finansial. Temuan ini selaras dengan argumen Deaton (2013) dalam *The Great Escape*, yang menekankan bahwa pengukuran kesejahteraan modern harus memperhitungkan dimensi kesehatan, otonomi, dan partisipasi sosial, bukan hanya income.

Lebih lanjut, paradoks ini menguatkan tesis Easterlin (2017) mengenai *Paradox of Economic Growth and Happiness*, yang menyatakan bahwa peningkatan materi tidak selalu berkorelasi linier dengan kebahagiaan subjektif. Para pedagang di Niti Mandala menunjukkan tingkat life satisfaction yang stabil meskipun berada di ambang batas kemiskinan formal. Hal ini terjadi karena mereka mengoptimalkan apa yang dimiliki yaitu waktu dan ruang untuk menciptakan nilai tambah non-moneter. Sen (1999), melalui *Capability Approach*-nya menyebut ini sebagai perluasan kebebasan substantif: pedagang memiliki kapabilitas untuk mengatur jadwal kerja mereka sendiri, hadir di acara keluarga, dan menghindari hierarki kerja formal yang kaku. Kesejahteraan, oleh karenanya, bukanlah fungsi dari seberapa banyak uang yang mereka miliki, melainkan seberapa besar kebebasan yang mereka nikmati untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai.

Modal Sosial dan Jejaring Informal sebagai Kapital Kesejahteraan

Di tengah ketiadaan perlindungan sosial formal (seperti asuransi kesehatan swasta atau jaminan pensiun), pedagang di Lapangan Puputan Niti Mandala membangun sistem jaring pengaman (informal safety net) yang kokoh berbasis modal sosial. Observasi lapangan mengidentifikasi adanya praktik solidaritas organik yang berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko. Ketika seorang pedagang mengalami sakit, terkena tilang, atau mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem (hujan deras yang mengusir pengunjung), rekan-rekan sesama pedagang sering kali menyediakan pinjaman tunai tanpa bunga atau membantu menjaga lapak secara bergantian. Praktik ini merupakan manifestasi nyata dari bonding social capital yang dijelaskan oleh Portes (1998) sebagai sumber daya yang tertanam dalam jaringan hubungan sosial, yang memberikan akses kepada dukungan material dan emosional.

Sistem arisan informal atau menabung bersama yang dijalankan secara sukarela antar-pedagang kuliner menjadi contoh konkret bagaimana modal sosial dikonversi menjadi stabilitas finansial. Berbeda dengan lembaga keuangan formal yang mensyaratkan agunan dan birokrasi rumit, sistem ini berbasis kepercayaan (*trust*) dan sanksi sosial. Woolcock dan Narayan (2000) menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan, modal sosial bertindak sebagai perekat yang memungkinkan aksi kolektif untuk mengatasi kegagalan pasar. Di Niti Mandala, modal sosial ini juga berperan dalam menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*). Informasi mengenai lokasi strategis, jadwal inspeksi Satpol PP, atau tren barang dagangan tersebar cepat melalui jaringan

obrolan santai (nongkrong), mengurangi ketidakpastian informasi yang biasanya menghambat efisiensi ekonomi informal.

Selain ikatan internal (*bonding*), pedagang juga mengembangkan bridging social capital melalui interaksi harmonis dengan aktor eksternal, termasuk pengelola kawasan dan aparat ketertiban umum (Satpol PP). Alih-alih hubungan konfrontatif yang sering digambarkan dalam literatur penertiban PKL, di Niti Mandala terbentuk modus koeksistensi negosiatif. Roy (2005) dalam studinya tentang Urban Informality menyebut dinamika ini sebagai taktik perlawanan dan adaptasi di mana sektor informal bernegosiasi untuk mendapatkan legitimasi spasial sementara. Pedagang memahami "kode etik" ruang publik: mereka membersihkan area setelah berjualan, tidak menghalangi jalur pejalan kaki utama, dan menghormati acara resmi pemerintah. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan toleransi operasional. Chen (2012) berargumen bahwa kontribusi sektor informal terhadap resiliensi ekonomi kota sering kali diabaikan karena fokus kebijakan yang terlalu represif. Di Denpasar, simbiosis mutualisme ini memungkinkan sektor informal bertahan dan bahkan berkembang, membuktikan bahwa modal sosial dapat menggantikan peran institusi formal dalam menyediakan keamanan ekonomi. Laporan *World Happiness Report* terbaru juga mendukung temuan ini, di mana Helliwell *et al.* (2023) menyoroti bahwa dukungan sosial dan kepercayaan interpersonal adalah prediktor utama kebahagiaan nasional, sering kali melampaui pengaruh faktor ekonomi murni.

Makna Kesejahteraan Subjektif dan Resiliensi Berbasis Lokalitas

Kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) pedagang di Niti Mandala tidak dapat dipisahkan dari akar budaya lokal Bali yang meresap dalam praktik ekonomi sehari-hari. Konsep Menyama Braya (persaudaraan/kekeluargaan) bukan sekadar slogan pariwisata, melainkan prinsip operasional yang mengatur interaksi ekonomi. Rasa kebersamaan ini menciptakan lingkungan kerja yang rendah stres dan tinggi dukungan emosional. Diener, Oishi, dan Tay (2018) dalam tinjauan mereka tentang riset *Subjective Well-Being* menekankan pentingnya dimensi afektif (perasaan positif/negatif harian) selain dimensi evaluatif (kepuasan hidup keseluruhan). Bagi pedagang Niti Mandala, dimensi afektif dipenuhi melalui interaksi sosial yang hangat dengan pelanggan tetap dan rekan sejawat, mengubah aktivitas jual-beli menjadi peristiwa sosial yang menyenangkan.

Nilai spiritualitas Bali, khususnya prinsip menerima Suka-Duka (senang-susah) sebagai bagian alami dari kehidupan, membentuk kerangka resiliensi psikologis yang

tangguh. Ketika pendapatan anjlok di hari tertentu, pedagang tidak serta-merta jatuh dalam keputusan eksistensial karena mereka memandang hal tersebut sebagai siklus alamiah yang akan diimbangi oleh rezeki di hari lain. Pandangan dunia ini melindungi mereka dari kecemasan kronis yang sering menghantui pekerja formal di sektor kompetitif. Scoones (2015), dalam kerangka *Sustainable Livelihoods*, mencatat bahwa aset budaya dan spiritual merupakan komponen kunci dari modal manusia yang sering terlupakan dalam analisis penghidupan berkelanjutan. Di Bali, modal budaya ini bertindak sebagai filter kognitif yang mentransformasi persepsi atas risiko ekonomi menjadi penerimaan yang tenang, sehingga meningkatkan life satisfaction.

Otonomi waktu juga menjadi pilar utama kesejahteraan subjektif. Kebebasan untuk menentukan jam kerja memungkinkan pedagang menyeimbangkan peran ekonomi dengan peran domestik dan religius. Seorang ibu penjual jajanan tradisional dapat berhenti berjualan lebih awal untuk menghadiri upacara di pura keluarga tanpa takut dipecat. Fleksibilitas ini memberikan rasa kontrol (*sense of control*) atas hidup mereka, yang merupakan determinan kuat kebahagiaan menurut Kahneman & Deaton (2010). Meskipun pendapatan mereka mungkin tidak mencapai ambang batas yang secara statistik dianggap "bahagia", kualitas pengalaman harian mereka yang kaya akan makna, otonomi, dan koneksi sosial menciptakan apa yang kami sebut sebagai *Invisible Prosperity*. Chambers (1995) mengingatkan kita untuk selalu bertanya, "*Whose reality counts?*" Dalam kasus ini, realitas pedagang Bali menunjukkan bahwa kemakmuran bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih utuh dalam jaringan sosial dan budaya yang mendukung. Bank Dunia (2019) dalam laporannya tentang *Rethinking Informal Wealth* mulai mengakui bahwa ketahanan urban di negara berkembang sangat bergantung pada kapasitas adaptif sektor informal seperti ini, yang didukung oleh struktur sosial yang kuat.

Implikasi Kebijakan dan Tata Ruang Perkotaan

Temuan mengenai *Invisible Prosperity* di Lapangan Puputan Niti Mandala memiliki implikasi kebijakan yang mendesak bagi Pemerintah Kota Denpasar dan pengelola ruang publik. Pendekatan konvensional yang bersifat regresif berupa penertiban paksa (*repressive eviction*) atau pelarangan total tidak hanya mengabaikan hak asasi ekonomi warga, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem modal sosial dan resiliensi komunitas yang telah terbangun secara organik. Kebijakan semacam itu justru akan mengikis invisible prosperity dengan menghilangkan otonomi dan jaringan dukungan yang menjadi tulang punggung kesejahteraan pedagang.

Sebaliknya, diperlukan pergeseran paradigma menuju inclusive urban governance atau tata kelola kota yang inklusif. Pertama, pemerintah perlu mengakui keberadaan sektor informal sebagai aset ekonomi perkotaan yang valid, bukan sebagai masalah ketertiban semata. Penataan ruang harus bersifat adaptif, menyediakan zona-zona khusus yang fleksibel untuk operasi pedagang kaki lima dengan fasilitas dasar (pengelolaan sampah, akses air bersih, dan penerangan) tanpa membebani mereka dengan retribusi yang memberatkan. Kedua, memperkuat kelembagaan informal yang sudah ada, seperti paguyuban pedagang, dengan memberikan pengakuan legal dan fasilitasi pelatihan manajemen usaha sederhana, tanpa mencoba menggantikannya dengan struktur birokrasi yang kaku. Ketiga, integrasi nilai lokal Menyama Braya dalam regulasi tata ruang dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana pedagang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan ruang publik. Dengan demikian, kebijakan tata ruang tidak hanya menciptakan kota yang rapi secara visual, tetapi juga kota yang adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi, tempat Invisible Prosperity dapat terus berkembang sebagai bagian integral dari identitas urban Denpasar.

Secara teoretis, artikel ini memberikan kontribusi epistemologis yang signifikan dengan mengintegrasikan *Capability Approach* Sen (1999) dan literatur *Subjective Well-Being* (Diener *et al.*, 2018) dengan kearifan lokal (*indigenous knowledge*) dalam konteks ruang publik perkotaan Asia Tenggara. Studi ini membuktikan bahwa kapabilitas untuk mencapai fungsi-fungsi kehidupan yang bernilai (*valued functionings*) pada pedagang informal sangat bergantung pada faktor konversi berbasis komunitas dan budaya, bukan semata-mata pada sumber daya finansial individual. Hal ini selaras dengan argumen Chambers (1995) tentang pentingnya mendengarkan realitas siapa yang dihitung, di mana realitas pedagang di lapangan puputan menunjukkan bahwa kebebasan substantif dan rasa memiliki komunitas lebih berdampak pada kebahagiaan daripada kenaikan pendapatan marginal, sebuah fenomena yang juga diamati dalam paradoks Easterlin (2017) dan batasan hubungan pendapatan-emosi yang dijelaskan Kahneman & Deaton (2010). Dengan demikian, Invisible Prosperity bukan sekadar istilah deskriptif, melainkan konstruk analitis baru yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana kemiskinan dan kekayaan dialami secara subjektif di tengah kerumitan urbanitas Global South.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju tata kelola kota yang inklusif (*inclusive urban governance*). Pertama, Pemerintah Kota Denpasar dan Pengelola Kawasan Lapangan puputan Nii Mandala disarankan untuk menerapkan *Temporal Zoning System* (Zonasi Waktu dan

Ruang Adaptif). Alih-alih pelarangan total, regulasi harus mengakomodasi ritme temporal pedagang misalnya, mengizinkan operasi penuh pada malam hari dan akhir pekan sambil menjaga keteraturan siang hari sebagaimana diusulkan dalam kerangka informalitas urban Roy (2005). Kedua, diperlukan pengakuan formal terhadap modal sosial melalui kemitraan strategis dengan Paguyuban Pedagang. Mengingat peran vital jaringan sosial sebagai penstabil ekonomi (Woolcock & Narayan, 2000; Portes, 1998), pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan manajemen dan akses kesehatan melalui paguyuban ini, sehingga memperkuat kapasitas kolektif mereka tanpa merusak struktur organik yang sudah ada. Ketiga, Bappeda dan instansi terkait perlu meredefinisikan indikator garis kemiskinan dan desain bantuan sosial perkotaan. Intervensi kebijakan harus bergeser dari bantuan tunai kondisional yang kaku menuju dukungan yang memperkuat aset produktif dan ketahanan sosial, sejalan dengan rekomendasi World Bank (2019) tentang pemikiran ulang kekayaan informal dan ketahanan urban.

Meskipun penelitian ini menawarkan wawasan mendalam, terdapat keterbatasan metodologis yang perlu diakui. Studi kualitatif-fenomenologis ini terbatas pada satu lokasi spesifik di Bali, sehingga generalisasi statistik ke konteks kota lain di Indonesia atau Asia Tenggara harus dilakukan dengan hati-hati. Dinamika budaya Bali yang unik mungkin tidak sepenuhnya replikabel di wilayah dengan struktur sosial berbeda. Oleh karena itu, agenda riset mendatang disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas kota guna menguji validitas eksternal konstruk Invisible Prosperity. Selain itu, pendekatan mixed-methods longitudinal akan sangat berharga untuk mengukur dampak jangka panjang dari perubahan regulasi tata ruang terhadap kesejahteraan subjektif pedagang, serta untuk mengkuantifikasi sejauh mana modal sosial berkontribusi terhadap stabilitas pendapatan dalam kerangka Sustainable Livelihoods (Scoones, 2015). Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi interaksi antara digitalisasi ekonomi informal dan resiliensi tradisional, sebagaimana dibahas dalam literatur ekonomi kaum miskin terbaru (Banerjee & Duflo, 2011; Deaton, 2013; Chen, 2012), serta memantau tren kebahagiaan global yang semakin menekankan pada kualitas institusi sosial (Helliwell *et al.*, 2023). Dengan melanjutkan eksplorasi ini, kita dapat merancang kebijakan publik yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga manusiawi dan berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini secara definitif memecahkan pemahaman kesejahteraan yang melingkupi sektor informal di Lapangan Puputan Niti Mandala Denpasar dengan

mendemonstrasikan bahwa kegagalan indikator makroekonomi konvensional dalam merekam kesejahteraan pedagang kecil bukanlah akibat dari ketiadaan kemakmuran, melainkan karena ketidakmampuan metrik tersebut untuk menangkap dimensi *subjective well-being*, likuiditas arus kas harian (*daily cash flow*), dan otonomi kerja. Melalui lensa etnografis-fenomenologis terhadap 150–200 pedagang, studi ini mengungkap bahwa kesejahteraan bagi subjek riset tidak didefinisikan oleh akumulasi aset statis atau pendapatan tahunan agregat, melainkan oleh sebuah kondisi holistik yang kami konseptualisasikan sebagai *Invisible Prosperity* (Kemakmuran Tak Kasatmata). Kondisi ini ditopang oleh tiga pilar fundamental: pertama, stabilitas likuiditas harian yang menjamin subsistensi tanpa jeratan utang terstruktur; kedua, modal sosial (*bonding dan bridging*) yang berfungsi sebagai jaring pengaman informal yang tangguh; dan ketiga, modal budaya lokal Bali khususnya prinsip Menyama Braya dan filosofi Suka-Duka yang bertindak sebagai mesin resiliensi psikologis. Temuan ini menegaskan ulang kritik bahwa ukuran ekonomi tradisional sering kali salah mengukur kehidupan karena mengabaikan aspek-aspek kualitatif yang justru menentukan kualitas hidup manusia.

REFERENSI

- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. PublicAffairs.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>
- Chen, M. A. (2012). *The informal economy revisited: Theory, data and policy* (WIEGO Working Paper No. 7). Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deaton, A. (2013). *The great escape: Health, wealth, and the origins of inequality*. Princeton University Press.
- Diener, E., Oishi, S., & Tay, L. (2018). Advances in subjective well-being research. *Nature Human Behaviour*, 2(4), 253–260. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6>
- Easterlin, R. A. (2017). Paradox of happiness. In R. A. Easterlin (Ed.), *Happiness, growth, and the life cycle* (pp. 3–21). Oxford University Press.
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2023). *World happiness report 2023*. Sustainable Development Solutions Network.
- Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(38), 16489–16493. <https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107>

- Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24(1), 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1>
- Portes, A., & Sensenbrenner, J. (1993). Embeddedness and immigration: Notes on the social determination of economic action. *American Journal of Sociology*, 98(6), 1320–1350. <https://doi.org/10.2307/2309555>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Roy, A. (2005). Urban informality: Toward an epistemology of planning. *Journal of the American Planning Association*, 71(2), 147–158. <https://doi.org/10.1080/01944360508976689>
- Scoones, I. (2015). *Sustainable livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing. <https://doi.org/10.3362/9781780448718>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation* (2nd ed.). Waveland Press.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Mismeasuring our lives: Why GDP doesn't add up*. The New Press.
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
- I Multidisiplin Ilmu, 3(1), 775-785. h